

Dinknati sebagai kredit produk konsumtif. (***)

...bisa jadi manusia kalau dimanusiakan oleh manusia.

Kedua, kembangkan kemampuan ana sesuai dengan bakat atau pembawaannya. Dengan

generasi baru dengan makan dari perbuatan keji dan mungkar. Hendaknya diingat, yang pertama kali

teratur. Jaman Rasulullah

Penulis adalah mantan guru.

Memberantas Kejahatan Perikanan

DITANGKAPNYA Vietnam dan China mencuri ikan di Laut Natuna Utara (LNU), jadi PR bagi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) yang baru (Detiknews, 2019). Pasalnya, kapal-kapal itu menangkap ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di perairan ZEEI, Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya di badan air, dasar laut dan di bawah dasar laut. Tapi, jika kapal asing hanya melintas di atas perairan itu, tidak masalah karena masih termasuk laut bebas menurut hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Sayangnya, status Satuan Tugas (Satgas) 115 yang memberantas penangkapan perikanan ilegal (illegal fishing) masa tugasnya berakhir Desember 2019 lalu dan nasibnya tak jelas kelanjutannya. Satgas ini dibentuk pemerintahan Jokowi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 115/2015. Satgas ini bertugas mendukung kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti untuk memberantas kejahatan perikanan. Satgas ini melibatkan berbagai lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pendek kata, Satgas ini bertindak sebagai penegak hukum yang menindak kejahatan perikanan. Memasuki

awal pemerintahan Jokowi periode kedua, muncul isu satgas ini bakal dibubarkan. Padahal selama beroperasi Satgas ini telah memberikan dampak positif bagi penyelamatan sumber daya ikan nasional, meskipun ada oknum-oknum yang tidak menyukainya.

Kinerja

Selama satgas ini beroperasi lima tahun belakangan telah menorehkan kinerja yang mengagumkan dalam memberantas kejahatan perikanan di Indonesia. Pertama, pada tahun 2015 telah menangani dan menyelesaikan kasus perbudakan manusia dalam kegiatan penangkapan ikan di Benjina, Maluku yang melibatkan warga negara asing yang berasal dari Myanmar. Mereka berjumlah 1.020 orang yang dipekerjakan tanpa upah layak, jaminan kesehatan dan sosial, hingga tewas akibat perlakuan tidak manusia dari perusahaan yang memperkerjakannya. Satgas berhasil menuntaskan kasus ini dan memulangkan warga negara asing ke negaranya. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi (anev) kepatuhan 1.132 kapal eks asing yang beroperasi di Indonesia. Imbasnya, kapal-kapal eks asing yang memalsukan ukuran tonase, perizinan, bendera asal kapal hingga penggunaan tenaga kerja asing ilegal diberhentikan pengoperasiannya karena

melakukan kegiatan praktik penangkapan ikan ilegal, tak dilaporkan dan tak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/ IUUF) di perairan Indonesia.

Ketiga, satgas 115 yang dikomandoi MenKP, Susi Pujiastuti, telah menggempal eks kapal-kapal asing ilegal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia yang jumlahnya mencapai 516 hingga Mei 2019. Merujuk dari prestasi kinerja Satgas ini menggambarkan bahwa keberadaannya tetap masih diperlukan dalam memberantas kejahatan perikanan di Indonesia. Apa dampak dari kinerja Satgas terhadap kondisi sosial ekonomi perikanan Indonesia?

Dampak

Kinerja satgas 115 dalam 5 tahun terakhir berdampak secara sosial, ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Meskipun ada kalangan yang sinis dan menyoalnya dengan argumen mematkan industri perikanan dalam negeri karena kekurangan bahan baku hingga mengabaikan/mengurangi ekspor. Sejatinya, kebijakan ini mampu membuat efek jera negara-negara pencuri ikan. Jumlah kapal ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia berangsur-angsur turun. Ditambah tatakelola perikanan Indonesia kurun waktu 2014-2019



Oleh Daud Yusof

kian membaik. Pertama, stok sumber daya ikan (SDI) meningkat signifikan dari 7,13 juta ton (2013) menjadi 12,54 juta ton (2016) per tahun (BPS, 2019).

Kedua, volume produksi perikanan tangkap dan budidaya melonjak dari tahun 2015-2018. Total volume produksi sebesar 22,31 juta ton (2015), 23,26 juta ton (2016), 23,01 juta ton (2017) dan 24,49 juta ton (2018) (BPS, 2019).

Ketiga, konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Indonesia naik dari 38,14 kg (2014) menjadi 47,12kg (2017) dan menjadi 50,59 kg (2018). Bandingkan dengan Malaysia 70 kg/kapita/tahun, dan Singapura 80 kg/kapita/tahun, dan Jepang mendekati 100 kg/kapita/tahun (BPS, 2019). Meski masih rendah dibandingkan mereka. Kita patut mengapresiasi bahwa rakyat Indonesia kian gemar mengkonsumsi ikan.

Keempat, kontribusi sektor perikanan

terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional berdasarkan harga konstan melonjak signifikan dari 2,32 persen (2014) menjadi 2,56 persen (2017). Namun tahun 2018 turun menjadi 2,29 persen. Pun, PDB sektor perikanan sendiri periode 2015-2018 meningkat dari 7,30 persen (2014), menjadi 8,35 persen (2015). Tahun 2016 PDB-nya sebesar 5,15 persen, 2017 5,95 persen dan (2018) 5,20 persen (BPS, 2019).

Kelima, penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan dalam kurun 2015-2018 meningkat. Penerimaan pajak tahun 2017 senilai Rp 936 miliar melonjak jadi Rp 1.554 miliar tahun 2018. PNBP tahun 2015-2018 naik dari Rp 137 miliar (2015), Rp 457 miliar (2016), Rp 624 miliar (2017) dan Rp 645 miliar (2018) (Satgas 115, 2019).

Keenam, produksi perikanan di pelabuhan perikanan berbasis kapal lokal melonjak drastis dibandingkan kapal asing pasca moratorium. Pelabuhan kapal lokal yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan, Prigi, Pemangkat, Cilacap, Ternate, Pekalongan, Kwandang, Tanjung Pandan, Sibolga dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari total produksinya naik dari 2104,5 ton (2014) menjadi 2136,2 (2015). Sedangkan, pelabuhan berbasis kapal asing PPP Teluk Batang, PPN Bitung, Karang Antu,

Tual, PPS Nizam Zachman, Pelabuhan Ratu, PPS Bungus, PPN Sungai Liat dan PPS Belawan total produksinya turun dari 2.496,1 ton (2014) menjadi 2304,24 ton (2015). Artinya, kebijakan moratorium efektif. Pelabuhan berbasis kapal asing pun tetap berproduksi alias tidak berhenti total (KKP, 2017).

Ketujuh, pendapatan perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan asing yang kerap mencuri ikan di perairan Indonesia anjlok. Umpamanya, (i) Thal Union Group PCL dari Thailand menangkap di Maluku dan Kepulauan Aru turun hingga 50 persen, (ii) Pingston Marine Enterprise dari Tiongkok menangkap di Merauke Papua anjlok hingga 74 persen dan (iii) RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monika Inc, Pamalario Inc, Starcky Vetures Inc, Virgo Inc dan Kembang Inc dari Philipina nyaris bangkrut akibat tak adanya pasokan bahan baku ikan dari transshipment (Kompas, 17/04/2017).

Kedelapan, data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir lewat nilai tukar nelayan (NTN) kian membaik selama 2015-2018. NTN tahun 2015 sebesar 106,14 naik jadi 108,14 (2016), menjadi 109,89 (2017) dan 113,28 tahun 2018. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) tahun 2015 sebesar 99,65, turun menjadi 98,96

(2016), naik jadi 99,09 (2017) dan mencapai 100,80 tahun 2018 (BPS, 2019). Indikator-indikator ini mengindikasikan kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan efektif berdampak bagi kesejahteraan nelayan.

Pemerintah mesti melanjutkan pemberantasan kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia maupun perbatasan maritim. Pasalnya, kebijakan ini berdampak signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan. Meski awalnya ada mafia perikanan dan komprador yang menentangnya dengan berbagai cara akibat menanggung perilaku nasinya. Mereka berkolaborasi dengan pengusaha asing, politisi hingga aparat yang meraup keuntungan sesaat lewat kejahatan IUUF. Sayangnya di tengah nasib satgas yang tidak jelas saat ini, kapal asing China dan Vietnam masuk menjarah ikan di perairan Laut Natuna Utara. Apakah pemerintah akan mendiamkan saja hal ini ataukah masih membutuhkan lembaga Satgas 115 untuk melindungi sumber daya ikan dan ancaman kehidupan nelayan kita dari serbuan kapal asing? Kita tunggu sikap pemerintah.

Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumihan Universitas Negeri Gorontalo